

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2020). *Manajemen kinerja organisasi publik*. Deepublish.
- Akhmad, Z. (2019). Efektivitas pelayanan publik dalam perspektif administrasi negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 6(2), 155–161.
- Astuti, I. (2019). *Manajemen sumber daya manusia*. Mitra Wacana Media.
- Budiani, N. (2007). *Evaluasi program dan kebijakan publik*. Ghalia Indonesia.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to justice: A world survey*. Sijthoff and Noordhoff.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (M. Thoha, Trans.). Gadjah Mada University Press.
- Fauziah, A., Abdulloh, U., & Rahman, A. (2022). Efektivitas program sosial dalam perspektif administrasi publik. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 365–374.
- Gunawan, I. (2021). *Good governance: Prinsip dan praktik pemerintahan yang baik*. CV Sahabat Ilmu.
- Hayat, A. (2017). *Administrasi dan pelayanan publik*. CV Pustaka Setia.
- Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Pedoman good governance*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Moenek, R. E., & Suwanda, D. (2019). *Governance dan reformasi birokrasi*. Alfabeta.
- Monir, Z. (2008). *Administrasi publik*. Bumi Aksara.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara.
- Purwanti, D. (2022). *Dasar-dasar ilmu administrasi*. LaksBang Pressindo.
- Rahardjo, S. (2000). *Hukum dan perubahan sosial*. Sinar Baru Algensindo.
- Sinambela, L. P. (2010). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan dan implementasi*. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2010). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana Prenada Media.
- Syam, A. (2020). Efektivitas dan efisiensi program pemerintah daerah dalam perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 129–138.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. The World Bank.